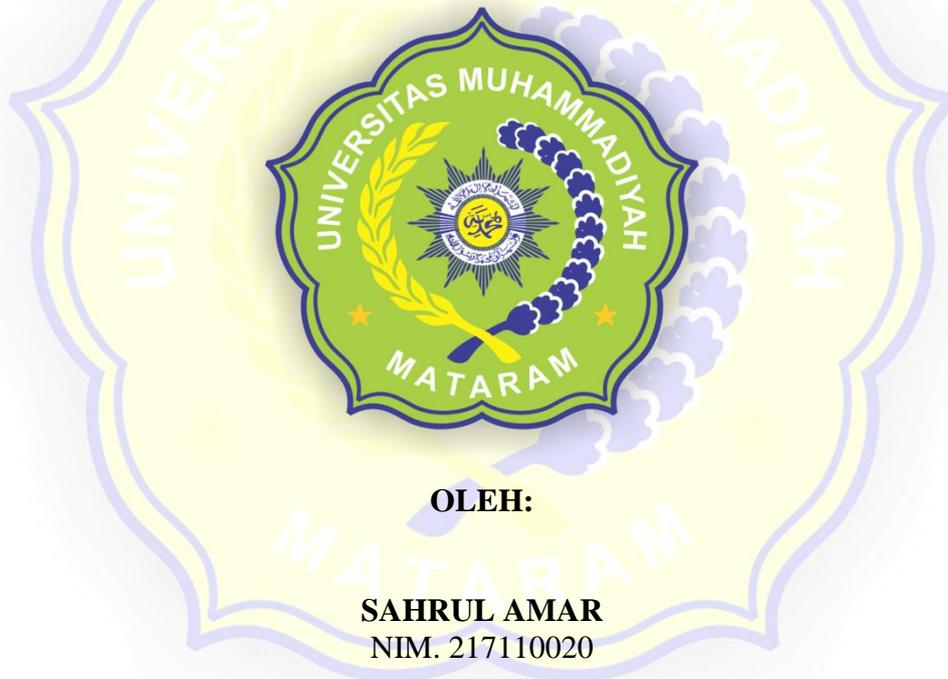


SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BIMA**

*“The Influence of Empowerment Of Micro, Small and Medium Enterprises
On Community Economic Development
In Bima Regency”*

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH:

SAHRUL AMAR
NIM. 217110020

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BIMA**

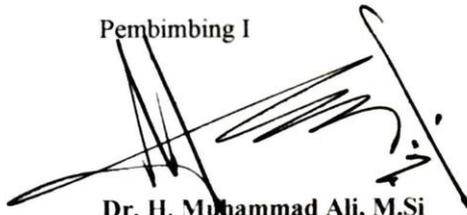
Oleh:

SAHRUL AMAR
NIM. 217110020

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal 11 Februari 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Pembimbing II



Salmin, M.Si
NIDN. 0805037201

Mengetahui,
Ketua Prodi Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BIMA**

Oleh:

SAHRUL AMAR
NIM. 217110020

Telah dipertahankan didepan penguji Pada

Hari/Tanggal: Senin, 15 Januari 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
NIDN.0806066801



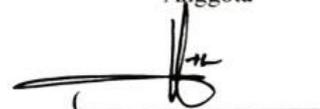
Ketua

2. **Salmin, M.Si**
NIDN. 0805037201



Anggota

3. **Drs. Amil, M.M**
NIDN. 0831126204



Anggota

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Sahrul Amar

NIM : 217110020

Alamat : Perumahan Taman Mutiara Jl. Hiu Kav. 100

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Mataram 23, Februari 2021



SAHRUL AMAR
NIM. 217110020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHUL AMAR
NIM : 217110020
Tempat/Tgl Lahir : DENBA, 23-12-1998
Program Studi : ADM. PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 005 238 240 765 / sahrulamar9@guai.com
Judul Penelitian : -

pengaruh pembicaraan UMMAT terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 55%, 59% 618%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Februari 2021

Penulis


SAHUL AMAR
NIM 217110020

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHRUL ANAR
NIM : 217110020
Tempat/Tgl Lahir : Dena, 23 Desember 1998
Program Studi : Ilmu adm. Publis
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 228 290 766 /sahrulamarq@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengaruh Pembangunan UMMAT terhadap Penguasaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima -

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Februari 2021

Penulis



SAHRUL ANAR
NIM. 217110020

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield with a blue border. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, a green palm tree on the left, and a blue and white floral wreath on the right. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in blue along the top curve, and 'MATARAM' is written in blue along the bottom curve.

**Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan
Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta**

(DRS ABD SAMAD & SRI WAHYUNINGSIH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yangtelah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima”**. Tak lupa sholawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa membimbing ummatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Salmin, M. Si Selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Orang Tua Tercinta Bapak Drs. Abd Samad dan Ibu Sri Wahyuningsih, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudari saya Nurrah Fatun.
7. Teman-teman Prodi Administrasi Publik angkatan 2017.

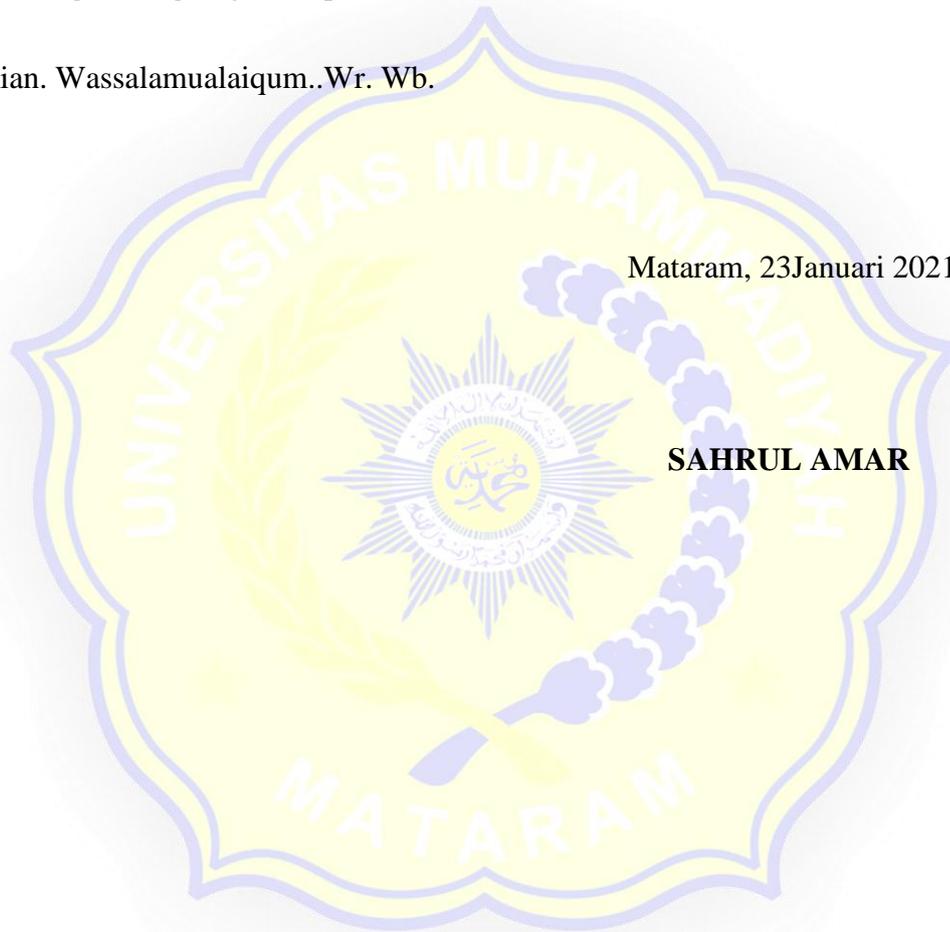
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik-baik mungkin, saya menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi saya dan pembaca sekalian.

Sekian. Wassalamualaiqum..Wr. Wb.

Mataram, 23 Januari 2021

SAHRUL AMAR



**PENGARUH PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BIMA**

**Sahrul Amar¹, Dr. H. Muhammad Ali², M.Si, Salmin, M.Si³
Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen sumber data tertulis, foto, dan statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang dalam penelitian ini yaitu informan yang meliputi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bima dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat laju Peningkatan UMKM tertinggi pada 3 tahun terakhir yaitu sebesar 15% sedangkan untuk laju perkembangan Ekonomi yaitu 12.5% menunjukkan taraf peningkatan yang relatif sama. Berdasarkan data persentase di atas, maka dapat dinyatakan bahwa antara laju Peningkatan UMKM dengan laju Perkembangan Ekonomi memiliki korelasi yang signifikan. Serta semakin tinggi nilai Peningkatan UMKM maka semakin meningkat pula Laju Pembangunan Ekonomi Masyarakat. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata kunci: Pemberdayaan UMKM, pembangunan ekonomi masyarakat.

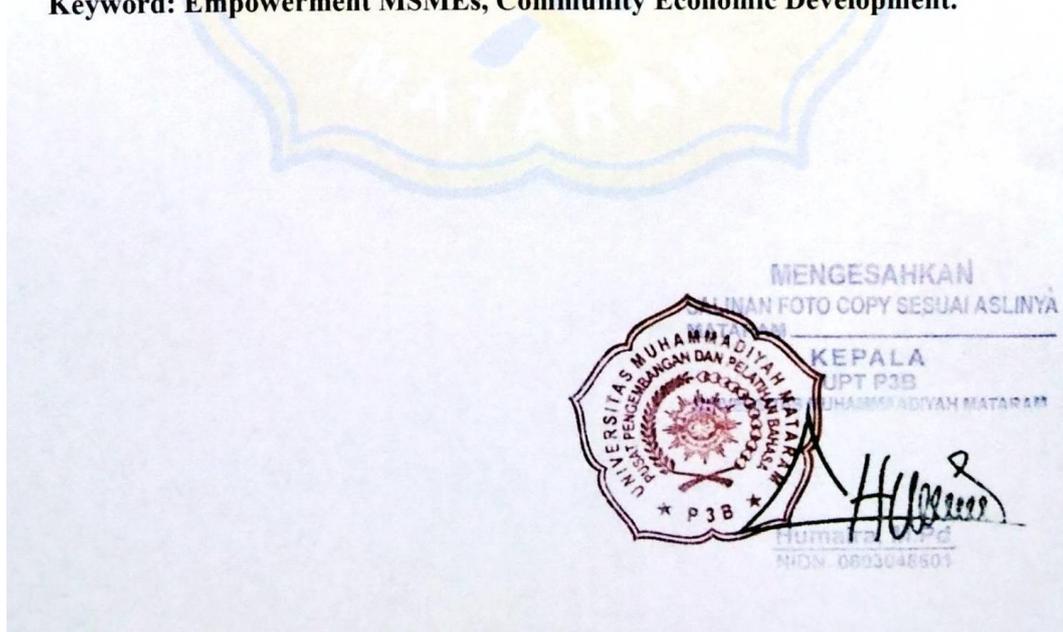
**THE INFLUENCE OF EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES ON COMMUNITY ECONOMIC
DEVELOPMENT
IN BIMA REGENCY**

**Sahrul Amar¹, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si², Salmin, M.Si³
Student¹, Main Advisor², Co-Advesor³
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political
Sciences
Muhammadiyah Mataram University**

ABSTRACT

This study aims to find out the factors that influence community economic development in Bima regency through the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The type of data used in this study is qualitative data type of words and actions, the rest is additional data such as written data source documents, photos, and statistics. The methods used in this research are observation, interview, and documentation methods. The samples in this study are informants that include the Head of the Cooperative and MSME Office of Bima District and businesses. The results showed that the highest rate of MSME increase in the last 3 years was 15% while for the economic development rate of 12.5% showed a relatively similar level of increase. Based on the percentage data above, it can be stated that between the rate of increase in MSMEs and the rate of Economic Development has a significant correlation. And the higher the value of MSME increase, the more the Rate of Community Economic Development. The empowerment of MSMEs is one of the steps to improve the economy of the community.

Keyword: Empowerment MSMEs, Community Economic Development.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.2.1. Tujuan.....	5
1.2.2. Manfaat	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Landasan Teori.....	8
2.2.1. Pemberdayaan.....	8
2.2.1.1. Pengertian Pemberdayaan	8
2.2.1.2. Tujuan Pemberdayaan	16
2.2.1.3. Sasaran Pemberdayaan.....	17
2.2.1.4. Strategi Pemberdayaan.....	18
2.2.1.5. Model Pemberdayaan.....	21
2.2.1.6. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan	23
2.2.1.7. Tahapan Pemberdayaan	27
2.2.1.8. Metode Pemberdayaan	34
2.2.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	35
2.2.2.1. Pengertian UMKM.....	35

2.2.2.2. Kriteria UMKM	38
2.2.2.3. Karakteristik UMKM.....	40
2.2.2.4. Peran dan Kontribusi UMKM.....	43
2.2.2.5. Permasalahan Internal dan Eksternal UMKM	44
2.2.3. Pembangunan Ekonomi	45
2.3. Kerangka Berpikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian.....	51
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.3. Pemilihan Informan/Naarasumber	51
3.4. Sumber dan Jenis Data	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6. Teknik Analisa Data	55
3.7. Uji Validitas Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1. Gambar Umum Objek Penelitian	58
4.2. Hasil Penelitian	60
4.2.1. Deskripsi Data Penelitian.....	60
4.2.2. Penentuan Responden	60
4.3. Pembahasan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Dan Skala Usaha UMKM.....	2
Tabel 1.2 Data Capaian Kegiatan Pertumbuhan Pengembangan UMKM	4
Tabel 4.1 Daftar Nama Responden	61
Tabel 4.2 Jumlah UMKM di Kab. Bima	62
Tabel 4.3 Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha	63



DAFTAR GRAFIK

Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	63
Tabel 4.2 Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha.....	65
Tabel 4.3 Perbandingan Peningkatan Ekonomi dan UMKM.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landasan sistem ekonomi negara di atur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang–Undang Dasar Negara 1945 mengatur tanggungjawab yang dibebankan kepada negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain ditujukan kepada negara, tanggung jawab juga dibebankan kepada golongan yang mampu berusaha. Oleh karena itu, dalam Pasal 33 Undang–Undang Dasar Negara 1945 memuat semangat kebersamaan (kekeluargaan), sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial, pelaku usaha, bangunan dan wadah atau bentuk usaha, cara penggunaan/proses berusaha, serta tujuan akhir kegiatan usaha yaitu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Ketika terjadi krisis moneter melanda Indonesia di Tahun 1998, banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke Negara-negara lain, sehingga perekonomian Indonesia dikala itu semakin terpuruk. Namun Usaha mikro, kecil dan menengah mampu bertahan, cenderung bertambah dan mampu menopang roda perekonomian bangsa Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu sektor industri yang hanya sedikit terkena dampak krisis global yang melanda dunia, karena UMKM dapat di perhitungkan dalam meningkatkan kompetitif pasar. Peranan UMKM pada masa tersebut dipandang sebagai katub penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi baik dalam mendorong

laju pertumbuhan ekonomi maupun tenaga kerja dalam rangka menyejahterakan rakyat.

Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun (2008), sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKMdibedakan secara masing-masing meliputi : usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pengertian UMKM pada umumnya adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Seperti yang diketahui melalui sumber data BPS ada sebanyak 648.987 Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1.1 Jumlah UMKMB Per Kab/Kota Se-Ntb
Per 31 Desember 2018

NO	KAB/KOTA	KLASIFIKASI USAHA				JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	
1	Mataram	46,328	11,007	632	179	58,146
2	Lombok Barat	110,322	10,286	461	34	121,103
3	Lombok Utara	7,037	369	2		7,408
4	Lombojk Tengah	121,636	7,445	321	28	129,430
5	Lombok Timur	144,029	16,266	904	62	161,261
6	Sumbawa Barat	14,898	1,651	84	19	16,652
7	Sumbawa	40,620	6,661	231	40	47,552
8	Dompu	26,558	2,019	69	11	28,657
9	Bima	48,952	4,535	107	17	53,611
10	Kota Bima	22,267	2,713	163	24	25,167
Jumlah		582,647	62,952	2,974	414	648,987

Sumber Data BPS 2006 (Sensus 2006) + WUB 31 Desember 2018

Peran UMKM dalam menstabilkan pendapatan nasional maupun mengatasi pengangguran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab III Pasal V tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa *“Meningkatkan peran Usaha Mikro, kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (peningkatan kesejahteraan)”*. Dalam ekonomi makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah kurangnya kesejahteraan masyarakat dan membahas tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah yang ada di pulau sumbawa yang merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani, selain petani kabupaten bima mempunyai sumber daya alam yang melimpah dari berbagai macam sektor. Di setiap kecamatan masing-masing memiliki pelaku usaha dengan jenis wirausaha yaitu toko, warung, tukang jahit, bertani, berternak, menjual makanan cepat saji dan lain sebagainya.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakatnya Pemerintah Kabupaten Bima memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang ada di kabupaten bima, salah satunya dengan adanya kerajinan tenun yang merupakan ciri khas dan kebudayaan kabupaten bima. Dengan latar belakang di atas menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mendukung SDM dan SDA dalam mengembangkan usaha meningkatkan pendapatan perekonomian di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

Tabel 1.2 Berikut Adalah Data Capaian Kegiatan Pertumbuhan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bima

NO	Nama Program Kegiatan	Capaian		Jumlah
		s/d 2018	Juli 2019	
1	Program Penumbuhan UMKM:			
	a. Penemuan wirausaha pemula/Baru	11405	152	11557
	b. Mikro	2830	-	2830
	c. Kecil	77	-	77
	d. Menengah	10	-	10
2	Sertifikat atas Hak Tanah Bagi UMKM	1000	-	1000
3	Revitalisasi Pasar Tradisional dari Dana Tugas Pembuatan Kememkop UKM RI	4	1	5
4	Bantuan dana bergulir dan peralatan usaha:			
	a. Bantuan dana bergulir	241 UKM	-	241 UKM
	b. Bantuan Peralatan Usaha	809 UKM	-	809 UKM
5	Penataan PKL	2	-	2
6	Diklat Pengolahan Produk Unggulan Daerah Dan Kewirausahaan bagi UMKM	640 UKM	60 UKM	700M

Sumber: Pelaku Usaha

Dari paparan diatas terlihat bahwa. Di Kabupaten Bima menjadi pokok permasalahannya adalah kekurangan pemberdayaan UMKM sehingga mempengaruhi pembangunan ekonomi masyarakat.Oleh karena itu Pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima menjadi alasan peneliti untuk tertarik dalam melakukan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dibuat rumusan masalah :

- 1.2.1. Bagaimanakah Pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima?
- 1.2.2. Apa sajakah faktor yang menghambat Pemberdayaan UMKM terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.3.2. Manfaat

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Administrasi Publik pada Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Bagi peneliti sendiri untuk mengetahui sekaligus menambah wawasan tentang Pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bima.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media informasi khususnya untuk administrator agar dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan terutama bidang administrasi publik.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh pemerintah untuk mengembangkan pemberdayaan UMKM terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bima.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Melihat masalah dan judul yang akan diteliti, maka diperlukan adanya pemaparan tentang penelitian terdahulu guna mengungkapkan fenomena yang sama dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan. Secara ringkas penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang akan dilakukan yaitu :

2.1.1. Lamzi (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan” memperoleh hasil penelitian menunjukkan sebesar 93,57 persen variabel independen (UMKM dan tenaga kerja) menjelaskan pengaruh variabel terikat (pertumbuhan ekonomi). Sementara itu variabel Pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 31,03 persen setiap peningkatan 1 persen UMKM.

2.1.2. Magdalena Silawati Samosir (2016) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberdayaan Dan Kinerja UMKM Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM Di Kabupaten Sikka-NTT” memperoleh hasil. Setelah melakukan penelitian bahwa pemberdayaan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelaku UMKM serta pemberdayaan dan kinerja UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku

UMKM, dan kinerja secara signifikan berperan memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kabupaten Sikka-NTT.

2.1.3. Puti Andiny(2018) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa” mendapatkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses pemberdayaan UMKM mampu menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pemberdayaan

2.2.1.1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan (empowerment) berasal dari akar kata empower yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana “daya” bermakna kekuatan (power) atau kemampuan. Menurut Sulistiyani (2004: 77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai: Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu,

kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginankeinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

Dalam jurnal internasional pemberdayaan adalah: *“The concept of empowerment has been developed and employed in a wide array of definitions in social-science research. Friedmann (1992) in Zimmerman (1995) distinguishes between empowering process and empowered outcomes. The first refers to how people, organizations, and communities become empowered, and the latter refers to the consequences of those processes. The concept of empowerment is applicable for those who lack power of those whose potential is not fully developed in improving the quality-of-life, including urban poor. This concept encourages the poor to reacquire the power and control over their own lives.*

Dapat diartikan sebagai berikut: konsep pemberdayaan telah dikembangkan dan digunakan dalam berbagai definisi dalam penelitian sosial sains. Friedmann (1992) dalam Zimmerman (1995) membedakan antara proses pemberdayaan dan hasil diberdayakan. Pertama merujuk kepada bagaimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat menjadi berdaya, dan yang terakhir mengacu pada konsekuensi dari proses-proses tersebut. Konsep pemberdayaan berlaku bagi mereka yang tidak memiliki

kekuasaan atau mereka yang potensial belum sepenuhnya dikembangkan dalam meningkatkan kualitas dalam kehidupan, termasuk perkotaan yang miskin. Konsep ini mendorong masyarakat untuk kekuasaan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012:27) mengartikan pemberdayaan yaitu: Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan

tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Rusmiyati (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003:43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu to give or authority dan to give to or enable. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan dapat didefinisikan setiap orang memperoleh pemahaman dan pengendalian kekuatan sosial, ekonomi, dan/atau politik untuk memperbaiki keberadaannya di masyarakat. Pemberdayaan itu terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, setiap orang mengembangkan kesadaran awal sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk

memperbaiki kehidupannya dan memperoleh pelbagai keterampilan yang memungkinkan mereka melaksanakannya. Kedua, melalui pengambilan tindakan, mereka mengalami keberdayaan dan kepercayaan dirinya meningkat. Ketiga, karena adanya pertumbuhan keterampilan dan kepercayaan, setiap orang bekerjasama berusaha mempengaruhi keputusan dan sumberdaya yang mengakibatkan kesejahteraannya (Rifa'i, 2008:40).

Prijono dan Pranarka (1996:88) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Secara konseptual menurut Saraswati dalam Alfitri (2011: 24) pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut: (a) *Learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-

menerus, dampaknya dapat terlihat; (b) *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat; (c) *Self evaluation*. pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri; (d) *Self development and coordination*. Artinya menodorong agar mampu melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas; (e) *Self selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan; (f) *Self decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya. Salah satu komponen yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program adalah proses. Melalui proses yang tepat diharapkan sebuah program dapat berjalan dengan lancar dan sistematis sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai efektif dan efisien. Hal ini senada dalam jurnal Internasional bahwa:

“Empowerment is a management practice of sharing information, rewards, and power with employees so that they can take initiative and make decisions to solve problems and improve service and performance. Empowerment is based on the idea that giving employees skills, resources, authority, opportunity, motivation, as well as holding them responsible and accountable for outcomes of 16 their actions, will contribute to their competence and satisfaction. Empowerment means ensuring that individuals have the capacity and opportunity to equip themselves with the skills and knowledge necessary to make informed life choices (Kumar, 2017: 59)”.

Dapat diartikan sebagai berikut: pemberdayaan adalah praktek proses berbagai informasi, imbalan, dan kekuasaan dengan karyawan sehingga mereka dapat mengambil inisiatif dan membuat keputusan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan pelayanan dan kinerja. Pemberdayaan didasarkan pada gagasan bahwa pemberian keterampilan karyawan, sumber daya, otoritas, peluang, motivasi, serta menahan mereka bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan mereka, akan memberikan kontribusi untuk kompetensi dan kepuasan mereka. Pemberdayaan berarti memastikan bahwa individu memiliki kapasitas dan kesempatan untuk membuat pilihan hidup (Kumar, 2017:59).

Adamson (2010:118) dalam jurnal internasional juga menjelaskan bahwa:

“In the JRF study a concept of empowerment was derived from consideration of Steven Lukes” (1974) model of power. For empowerment to have occurred an ability to influence all three „„faces of power”” identified by Lukes

must be evident. A simple ability to make decisions, a role in influencing the overall regeneration agenda and an ability for community views to change the ideological assumptions of regeneration professionals would need to be evident."

Yang artinya adalah dalam studi JRF, konsep pemberdayaan berasal dari pertimbangan model kekuasaan Steven Lukes (1974). Untuk pemberdayaan telah terjadi kemampuan untuk mempengaruhi ketiga "wajah kekuasaan" yang diidentifikasi oleh Lukes harus jelas. Kemampuan yang sederhana untuk membuat keputusan, peran dalam mempengaruhi agenda regenerasi secara keseluruhan dan kemampuan untuk pandangan masyarakat untuk mengubah asumsi ideologis dari para profesional regenerasi perlu dibuktikan.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Bisa diasumsikan tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadangkadang mereka tidak menyadari bahwa daya tersebut belum dapat diketahui. Masyarakat kurang berdaya perlu dibimbing melewati serangkaian proses secara bertahap dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di lingkungan sekitarnya, agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu untuk

mengelola potensi tersebut, sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri.

2.2.1.2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu mengembangkan dari masyarakat yang lemah, renta, miskin, marjinal, dan kelompok perempuan yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. (Sulistiyani, 2004:79-80).

Berdasar UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantumasyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne dalam Huraerah, 2011:99). Sehingga pemberdayaan memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

2.2.1.3. Sasaran Pemberdayaan

Pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di berdayakan, menurut

Schumacer dalam Sulistiyani (2004:90), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya sering dengan konsep *good governance*. Konsep ini menyetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras. Menurut Sumaryadi (2005:115) Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian yaitu sebagai berikut : a) terbuka kesadaran dan tumbuh peran aktif, mampu mengorganisir dan kemandirian bersama, b) memperbaiki keadaan sosial kehidupan kaum lemah, tak berdaya, dengan meningkatkan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha- usaha kecil di berbagai bidang ekonomi kearah swadaya, c) meningkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam ketrampilan teknis dan manajemen untuk memperbaiki produktifitas dan pendapatan mereka.

2.2.1.4. Strategi Pemberdayaan

Menurut Desmawati (2015:85) dalam jurnal menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat menurut FGD, wawancara mendalam dengan keyperson, berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga strategi pemberdayaan masyarakat. adapun ketiga strategi pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Supply lebih kecil dari demand

Strategi supply lebih kecil dari demand ini adalah memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kepada masyarakat miskin dan menganggur untuk diberi ketrampilan yang dimulai dari dasar (ketrampilan dasar) karena masyarakat (warga belajar) benar-benar belum memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan pasar.

2. Supply sama dengan demand

Strategi supply sama dengan demand ini adalah pelatihan diberikan kepada warga belajar terutama untuk menumbuhkembangkan skill kewirausahaan karena warga belajar telah memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Supply tidak sama dengan atau lebih tinggi demand

Pelatihan ini diberikan kepada warga belajar terutama untuk memfasilitasi peningkatan usaha atau memfasilitasi pencarian alternatif pengembangan

karena warga belajar telah memiliki ketrampilan tidak sama atau lebih tinggi dengan kebutuhan pasar.

Hasil jurnal penelitian dari Mulyono (2017:8), diperoleh tiga formulasi strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang yaitu pertama apabila supply lebih kecil dari demand, strategi ini difokuskan dari pelatihan dasar sampai warga belajar mampu usaha mandiri atau bekerja, kedua supply sama dengan demand, strategi ini difokuskan pada skill kewirausahaan, dan strategi yang ketiga apabila supply tidak sama dengan atau lebih tinggi dari demand, strategi ini difokuskan pada fasilitasi usaha atau fasilitasi pencarian alternatif pengembangan. Model strategi pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kinerja agen pembaharu dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Morris dan Binstock (1966) dalam Nasdian (2014:60) memperkenalkan tiga strategi perencanaan dan aksi pengembangan masyarakat. perencanaan dan aksi untuk perubahan tersebut dilaksanakan melalui: (1) Modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya; (2) Mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal; atau (3) Reformasi peraturan dan system fungsional suatu masyarakat.

Suharto dalam Huraerah (2011:106) konteks pekerjaan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara: (1) Aras Mikro, yaitu pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan konseling, stress managemen, crisis intervention. Tujuan utama adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. (2) Aras Mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap kelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. (3) Aras Makro, yaitu disebut juga pendekatan sebagai strategi system besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dengan tujuan memandang klien yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.2.1.5. Model Pemberdayaan

Menurut Rifa'i (2008:144), adanya model-model pemberdayaan masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut; (a) Struktur kelompok kecil, dapat terdiri atas kesamaan usia atau keragaman usia warga belajar dan dapat dibentuk dari kelompok yang telah ada atau kelompok baru. (b) Alih tanggungjawab, mensyaratkan kecukupan waktu dan kesempatan warga untuk memiliki program. (c) Kepemimpinan partisipan, biasanya harus dipelajari karena warga belajar telah terkondisi untuk menjadi pasif disekolah. (d) Agen sebagai fasilitator, bukan saja mensyaratkan 2pelatihan, melainkan juga seleksi yang benar. (e) Proses dan hubungan demokratis dan non hirarkhial beragam dari praktik pendidikan nonformal, dan karena itu diperlukan dukungan yang dapat diterima oleh semua organisasi. (f) Integrasi refleksi dan aksi, dapat didorong melalui proses belajar dari pengalaman, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan actual di dalam kehidupan warga belajar. (g) Metode yang dapat meningkatkan kesadaran diri sangat efektif dipresentasikan oleh rancangan program sementara dibandingkan dengan rancangan program yang direncanakan sebelumnya. (h) Perbaikan keberadaan sosial, ekonomi, dan atau politik merupakan tujuan jangka Panjang dari pemberdayaan.

Menurut Fakhruddin dkk, (2010: 17-19), beberapa cara pandang mengenai model pemberdayaan adalah sebagai berikut; (a) Pemberdayaan dimaknai dalam konteks penempatan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung dalam pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri, (b) Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak orang beragumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis seperti demokrasi, desentralisasi, good gavernance, otonomi daerah, masyarakat sipil dan selanjutnya. (c) Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan, (d) Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal sampai ke level structural masyarakat secara kolektif.

2.2.1.6. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menyatakan bahwa:

“Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menilai bahwa setiap penyuluh atau fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mardikanto (2017:106) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain yang mencakup: 1) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. mengenai hal ini harus dikaji secara mendalam, apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumber daya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu. 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan. 3) Keragaman budaya, artinya perbedaan harus memperhatikan adanya

keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. 7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang sesuatu yang ia kerjakan. 8) Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penggunaan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi. 9) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasan sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinannya. 10) Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi

yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. 11) Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. 12) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

Selain yang telah diungkapkan sebelumnya, Karsidi (1988) dalam Karsidi (2007: 5-6) juga mengungkapkan bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Belajar dari Masyarakat Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sendiri.
- b. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai

fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Walaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

- c. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah.

2.2.1.7. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004: 83), bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Sulistiyani (2004: 83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi : 1) Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan prilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya, aktor, pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat

merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan akan dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-kerampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini seingkali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitatornya saja.

Dalam proses pemberdayaan, ada tujuh tahapan yang seharusnya dilewati dalam program pemberdayaan masyarakat. Proses tahapan pemberdayaan menurut Adi (2002: 182-196) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahap yang harus dikerjakan, yaitu penyiapan petugas (tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*) dan penyimpanan lapangan merupakan prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b. Tahap Pengkajian (Assesment)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilihat secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (key-personal) tetapi dapat juga melalui kelompokkelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk melakukan assesment. Baik itu dengan pendekatan yang kuantitatif maupun kualitatif.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan (agen of change) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap Perfomalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan

gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan apabila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Pertentangan antar kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program kegiatan.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat atau mau meneruskan. Meskipun demikian, petugas harus tetap keluar dari komunitas secara perlahan-lahan dan bukan secara mendadak. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan secara sepihak dan tanpa disiapkan oleh petugas. Karena itu, bila petugas merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik jarang petugas tetap melakukan kontrak meskipun tidak secara rutin, dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Menurut Suparjan dan Hempri (2003:44), dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain: 1) Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. 2) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat

masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut. 3) Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. 4) Pemberdayaan juga perlu mengkaitkan dengan pembangunan sosial dan budaya masyarakat.

Dapat disimpulkan tahap-tahap pemberdayaan dimulai dari membantu mengelompokkan kebutuhan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan kesejahteraan hidup, dan pemberian fasilitas serta motivasi atau dukungan kepada masyarakat agar menuju masyarakat yang mempunyai kesadaran akan posisi dalam struktur sosial politik, mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi, meningkatkan kapasitas dalam pembangunan sosial dan budaya sehingga terciptalah masyarakat yang berdaya.

2.2.1.8. Metode Pemberdayaan

Menurut Maharani (2012:3) kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kesatuan proses yang berkelanjutan melalui kegiatan “kaji tindak yang partisipatif” atau dikenal sebagai Participatory Action Research/ PAR. Pengertian

PAR bukanlah sebuah „proyek“ yang melibatkan partisipasi masyarakat, melainkan lebih bernuansa filosofis untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri dan bagi kepentingan peningkatan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan potensi yang mereka miliki sendiri, melalui kegiatan aksi dan refleksi yang berkelanjutan.

2.2.2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

2.2.2.1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pengertian UMKM menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dimana BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga (IKRT). BPS mengklasifikasi industri berdasarkan jumlah pekerjaannya, yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5- 19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimana usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta. Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar.

2.2.2.3. Kriteria UMKM Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kriterion UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
4. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
5. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

3. Karakteristik UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

2.2.2.4. Karakteristik UMKM

Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. (Sulistiyastuti, 2004:145).

Partomo (2004:13) Kriteria umum usaha kecil dan menengah dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang sangat sederhana
- 2) Tanpa staf yang berlebihan
- 3) Pembagian kerja yang “kendur”
- 4) Memiliki hirarki manajerial yang pendek

- 5) Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan
- 6) Kurang membedakan aset pribadi dan aset perusahaan

Menurut Tulus T.H (2009:6-10) Tambunan dalam bukunya menjelaskan tentang karakteristik UMKM, yaitu sebagai berikut: 1) Sebagian besar UMKM yang ada, tidak berbadan hukum. 2) Lebih dari sepertiga pengusaha UMKM berusia diatas 45 tahun dan hanya sekitar 5,25% pengusaha UMKM yang berumur yang berumur dibawah 25 tahun. 3) Sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan kegiatan usaha yang dilakukan adalah latar belakang ekonomi. 4) Banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja. 5) Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi.

Karakteristik UMKM menurut Sudarno (2011:139) Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan

rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31), diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga (ISIC33) masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.

Dari berbagai karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik UMKM pada dasarnya memiliki tenaga kerja secukupnya dan tergolong dari keluarganya sendiri, sebagian besar tidak berbadan hukum, memiliki manajerial yang sederhana, pelaku usaha tidak memiliki pendidikan yang tinggi, menggunakan teknologi yang sesuai kebutuhan atau sederhana, menggunakan modal yang tergolong kecil dan berasal dari dana pribadi.

2.2.2.5. Peranan dan Kontribusi UMKM di Indonesia

UMKM, di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia.

a. Peranan UMKM di Bidang Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Rahmana (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan

transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (*garment*), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis.

b. Peranan UMKM di Bidang Sosial

Sulistiyastuti (2004:148) berpendapat bahwa UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal.

2.2.3. Permasalahan Internal dan Eksternal UMKM menurut (Hafsah dalam Yustika, 2006;40-41)

1) Permasalahan Internal

- a. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UMKM.
- b. Keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar.
- c. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang.

2) Permasalahan Eksternal

- a. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil.
- b. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan.
- c. Kurangnya dukungan.
- d. Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya.

2.2.4. Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan (Sukirno, 2006). Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang (Lincoln Arsyad, 1999).

Menurut Michael P. Todaro (2006), pembangunan di semua negara memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Meningkatkan taraf hidup, termaksud menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri, baik individu maupun bangsa.
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan Negara-negara lain, tetapi juga sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Pembangunan merupakan suatu proses secara struktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai program-program yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari pembangunan ekonomi antara lain: meningkatkan taraf hidup dari masyarakat suatu Negara, selain meningkatkan pendapatan perkapita dan menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan

pendidikan yang lebih bermutu dan perhatian yang lebih terhadap nilai-nilai budaya kemanusiaan yang ada.

Pembangunan Ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukung jalannya pembangunan ekonomi.

Pembangunan perekonomian secara keseluruhan memperbaiki kesejahteraan dari kehidupan masyarakat dan menghasilkan rasa percaya diri masing-masing individu sebagai suatu bangsa. Kemajuan ekonomi merupakan komponen utama dari suatu pembangunan, tetapi bukan satu-satunya komponen pembangunan Negara.

Faktor-faktor pembangunan ekonomi.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca,

hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Indikator merupakan sumber informasi yang sistematis serta obyektif yang hampir setiap hari beberapa surat kabar menulis statistik yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Indikator adalah sebuah instrument yang

menunjukkan keterkaitan berbagai hal. Pemerintah misalnya, secara regular mensurvei rumah tangga ataupun perusahaan untuk mempelajari aktivitas dan dampak kegiatan mereka terhadap kesejahteraannya.

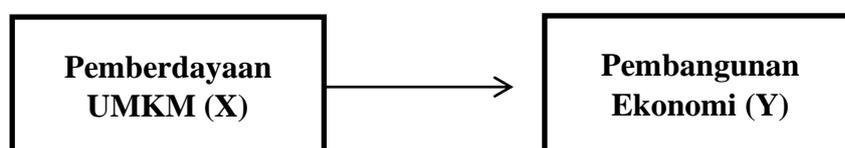
Tanpa adanya indikator-indikator ini, pola atau gejala yang sedang terjadi serta pengaruhnya akan sulit diketahui secara pasti. Indikator yang diperoleh secara survey oleh pemerintah ataupun lembaga yang berkepentingan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengawasi dan merumuskan suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa indikator pembangunan ekonomi adalah suatu instrument untuk mengetahui derajat pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara yang meliputi beberapa aspek.

Adapun pentingnya indikator-indikator pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Memantau perilaku perekonomian
2. Kepentingan analisis ekonomi
3. Dasar pengambilan keputusan
4. Dasar perbandingan internasional

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu berusaha menjawab besaran pengaruh variabel pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis penelitian ini berdasarkan tingkat kealamian objek yang diteliti termasuk jenis penelitian survey karena peneliti mendapatkan data dari tempat yang alamiah di kantor tersebut dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh-pengaruh pemberdayaan usaha kecil dan menengah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang peneliti lakukan berlangsung mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai selesai. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bima.

3.3. Pemilihan Informan/Narasumber

Menurut Patilama (2013: 12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap paling tahu dan yang memahami tentang apa yang kita inginkan dalam hal ini peneliti menggali data dari sumber data yang akurat.

Berdasarkan penjelasan di atas informan dalam penelitian ini adalah :

- 3.3.1. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bima
- 3.3.2. Staf Dinas Koperasi UKMK Kabupaten Bima
- 3.3.3. Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3.4. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

- 3.4.1. Data Primer : Data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.
- 3.4.2. Data Sekunder : Yaitu pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini

dapat berupa dokumen, arsip, majalah dan foto-foto yang berhubungan dengan keperluan penulis. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara observasi langsung ke lapangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat bagaimana hubungan antara pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima.

Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data yang penulis pakai sebagai berikut:

3.5.1. Pengamatan

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kuantitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleng, 2013: 174) sebagai berikut:

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi

yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Alat pengamatan dalam penelitian adalah *anecdotal record* (daftar riwayat kelakuan), catatan berkala, dan check list.

3.5.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Linclon dan Guba (dalam Moleong, 2013: 186) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperoleh informasi yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Metode wawancara digunakan sebagai sumber data primer atau sebagai sumber data yang utama dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dan wawancara dengan responden atau informan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Alat wawancara dalam penelitian ini adalah buku, polpen, dan alat perekam.

3.5.3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam buku Moleong, 2013: 216). Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat buku harian, surat keputusan, dokumen administrasi, arsip dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Alat dokumentasi dalam penelitian ini adalah kamera, alat perekam, dan handphone.

3.6. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif digunakan guna menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang terkumpul namun bukan membuat kesimpulan yang bersifat generalisasi (Sugiyono. 2004).

3.7. Uji Validitas Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

3.7.1. Derajat kepercayaan

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Derajat kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

3.7.2. Keteralihan

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

3.7.3. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau

beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

3.7.4. Kepastian

Kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastin bahwa sesuatu itu objek atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman sesorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif. Jadi objektivitas-subjektivitasnya suatu hal bergantung pada seseorang.